

Dinamika Penanganan Pengungsi Suriah di Lebanon

Muhammad Fauzan Alamari

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Achmad Yani
m.fauzan@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Penanganan Pengungsi Suriah di Lebanon menjadi masalah yang sangat kompleks. Posisi Lebanon yang berada diantara negara-negara yang berkonflik seperti Suriah dan Israel membuat Lebanon menjadi destinasi untuk menyelamatkan diri bagi para korban perang. Dilema yang dialami Lebanon terlihat ketika mereka tidak dapat menolak pengungsi yang masuk atas dasar kemanusiaan tetapi disaat yang sama kondisi sosial dan ekonomi di Lebanon tidak mendukung untuk dapat menerima pengungsi. Penerimaan masyarakat Lebanon akan pengungsi dari Suriah khususnya, mencapai titik dimana mereka merasa terancam dengan jumlah pengungsi yang terlalu besar sehingga mengganggu demografi di Lebanon. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi penanganan pengungsi Suriah di Lebanon. Artikel ini akan membahas mengenai dinamika keberadaan pengungsi Suriah di Lebanon yang dapat menciptakan dilema keamanan didalam masyarakat Lebanon itu sendiri dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan luar negeri dengan faktor domestik sebagai kajian utama. Hasil akhir penelitian menunjukkan jika penduduk Lebanon yang hanya 6 juta jiwa harus dihadapkan dengan jumlah pengungsi Suriah yang hampir 1 juta jiwa. Banyaknya pemukiman asing oleh pengungsi Suriah di Lebanon membuat potensi untuk konflik sipil sangat rentan terjadi antara penduduk Lebanon dengan pengungsi dari Suriah.

Kata Kunci: Penanganan Pengungsi, Pengungsi Suriah, Lebanon, Dilema Keamanan

Abstract

The way to handle Syrian refugees in Lebanon situation became a very complex issue. Lebanon position caught in between of two states that in stage of war likes Syria and Israel, it created a condition where Lebanon became a destination for the victims of war to save their selves. The dilemma that Lebanon have is in between cannot reject the refugees due to the humanitarian condition while at the same time social and economic condition in Lebanon cannot support to accept the refugees. The acceptance of refugees in Lebanese's perception came into an idea where the number of refugees could create a demographic imbalance in Lebanon. This article will discuss about the dynamics of Syrian Refugees existence in Lebanon in relations with security dilemma toward Lebanon citizens using foreign policy approach with domestic approach as main research view. The of this research showed The fact that Lebanon only has 6 millions citizens need to face with almost 1 million refugees came from Syria. The amount of illegal settlement

by Syrian refugees in Lebanon create a potency of civilian conflict between Lebanese citizen and Syrian refugees.

Keywords: *Handling Refugees, Syrian Refugee, Lebanon, Security Dilemma*

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap status pengungsi lintas batas telah diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan telah mendapatkan ratifikasi dari banyak negara (UNHCR, n.d.). Namun tidak semua negara melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, karena Lebanon menjadi salah satu negara yang belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai perlindungan terhadap status pengungsi (UNHCR, 2015). Namun, meskipun begitu, Lebanon termasuk kedalam salah satu negara yang seringkali ditempati oleh para pengungsi asing dalam jumlah yang tidak sedikit karena kebijakan *Open Door Policy*. Hal tersebut tidak luput dari faktor letak geografis wilayah Lebanon yang berdekatan dengan negara-negara Timur Tengah yang mengalami banyak konflik bersenjata seperti Suriah, Israel, Palestina, Irak, sehingga menyebabkan banyak krisis kemanusiaan. Dimana wilayah utara serta timur Lebanon berdekatan langsung dengan negara Suriah, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan negara Israel (Johnson et al., 2011, p. 13). Dalam hal ini Negara Suriah berdekatan secara langsung dengan Negara Irak dibagian timur (Kedutaan Besar Republik Indonesia, n.d.). Selain itu, wilayah Israel yang berdekatan dengan Palestina karena dalam hal ini wilayah Negara Palestina terletak di kedua sisi Israel (World Population Review, n.d.). Sehingga hal tersebut menjadikan Lebanon sebagai tuan rumah dalam menyediakan pemukiman bagi kehidupan para pengungsi asing dari berbagai negara asal khususnya di kawasan Timur Tengah, dengan menempatkan para pengungsi asing di wilayah berbeda antara lain seperti di Lebanon selatan, Beirut, Lebanon Utara dan Bekka (UNHCR, n.d.).

Pengungsi Palestina menjadi pengungsi pertama yang berada di negara Lebanon, hingga pada tahun 2017 terdapat bahwa 250 per 1.000 orang di Lebanon merupakan pengungsi dari Palestina (UNHCR, 2018, p. 21). Dengan masih terjadinya ketidakamanan di Palestina membuat keberadaan pengungsi Palestina di Lebanon masih terdapat hingga tahun 2020 dengan angka mencapai 480.000 orang (UNHCR, 2021, p. 20). Selain pengungsi dari Palestina, Lebanon juga dihadapkan dengan kedatangan pengungsi Irak sejak tahun 2007 yang mencapai 50.000 orang (Human Rights Watch, 2007, p. 1). Kedatangan pengungsi Irak terjadi sebagai dampak dari konflik internal setelah adanya invasi Amerika Serikat di Irak (Watson Institute, 2021). Semenjak penerimaan pada tahun 2007, kepedulian Lebanon terhadap pengungsi Irak masih berlanjut hingga pada tahun 2017, dimana wilayah Lebanon masih menerima keberadaan 5.700 pengungsi Irak di wilayah negaranya (UNHCR, 2018, p. 17). Serta 13.604 pengungsi Irak pada tahun 2020 (UNHCR, 2020).

Kebijakan dalam menerima pengungsi asing di Lebanon terus berlanjut ketika Lebanon harus dihadapkan dengan kedatangan 5.000 pengungsi Suriah di wilayah utara pada tahun 2011 (UNHCR, 2013). Tingginya jumlah pengungsi

Suriah terjadi sebagai dampak kegagalan Suriah dalam menghadapi fenomena *Arab Spring* sebagai gelombang demonstrasi terhadap rezim otoriter di negara kawasan Timur Tengah pada tahun 2010 hingga 2011 (Gaur et. al., 2023). Penerimaan pengungsi masih berlanjut di tahun 2017 dengan jumlah mencapai 992.100 orang Suriah (UNHCR, 2020, p. 14). Selain pengungsi dari ketiga negara asal tersebut, wilayah negara Lebanon juga ditempati oleh 2.323 pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan, dan pengungsi dari negara-negara asal lainnya yang mencapai 2.044 pengungsi yang berada di wilayah tersebut (UNHCR, 2020, p. 1). Dimana hal tersebut menyebabkan konflik bersenjata yang mengancam keamanan manusia di dalam negaranya. Kedatangan pengungsi Suriah di Lebanon terus mengalami peningkatan hingga mencapai total 1,14 juta orang (Edwards, 2014).

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa Lebanon sering kali menjadi tuan rumah bagi para pengungsi asing yang berasal dari berbagai negara di Kawasan Timur Tengah bahkan hingga Afrika Utara. Namun, meskipun begitu penerimaan pengungsi asing di wilayah Lebanon tentu menimbulkan banyak dilema yang berkelanjutan, karena jika dilihat dari kapabilitas negara Lebanon itu sendiri, penempatan pengungsi di wilayah negaranya tentu menjadi beban yang cukup berat. Sehingga dengan Lebanon menjadi tuan rumah bagi para pengungsi asing sejak lama menyebabkan kondisi yang sulit terkendali, dan hal tersebut menyebabkan 25% populasi di negara Lebanon telah terdata sebagai pengungsi asing (Kayali, 2022).

2. Pembahasan

2.1. *Dinamika Pengungsi Suriah di Lebanon*

Dalam hubungan internasional keamanan manusia menjadi salah satu pendekatan yang digunakan sebagai acuan dalam menghadapi tantangan abad ke-21 (UNHCR, 2016, p. 6). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah pengungsi yang masih hadir hingga abad ke-21 menjadi isu yang memerlukan pendekatan keamanan manusia atau Human Security. Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menekankan pemahaman keamanan manusia sebagai sebuah pendekatan yang berguna bagi negara dalam menghadapi tantangan luas dalam masalah kelangsungan hidup manusia (UNHCR, 2016, p. 6).

Sehingga, dalam hal ini keamanan manusia sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan yang mengancam keamanan manusia sebagai individu maupun kelompok. Keamanan manusia menekankan perlunya peningkatan kekuatan masyarakat dunia melalui sistem politik, ekonomi, sosial, militer dan lain sebagainya dalam memberikan bantuan terhadap kelangsungan hidup manusia (UNTFHS, n.d., p. 6). Keamanan manusia juga digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri terhadap respon negara dalam memberikan bantuan dalam bidang keamanan manusia. Terdapat tujuh bentuk dari keamanan manusia yaitu; ekonomi, politik, pribadi, kesehatan, pangan, masyarakat, komunitas (Gómez & Gasper, 2013, p. 2).

Dalam hal ini, masalah pengungsi termasuk ke dalam isu keamanan manusia yang berada dalam kategori *Community Security*. Karena *Community Security* merupakan pendekatan yang digunakan terhadap perlindungan terhadap sekelompok manusia yang dihadapkan dengan ketidakamanan terhadap etnis serta identitasnya seperti pengungsi (UNTFHS, n.d., p. 16). Sehingga dalam hal ini konsep *human security* dapat digunakan dalam membantu pengkajian terhadap perilaku Lebanon sebagai aktor negara yang memberikan respon dalam menerima keberadaan pengungsi asing sebagai masalah keamanan terhadap sekelompok manusia.

Lebanon merupakan negara di kawasan Timur Tengah dengan jumlah penduduk mencapai hingga 6.082 juta pada tahun 2017 (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018). Masyarakat domestik Lebanon memiliki berbagai keberagaman budaya, etnis dan agama, antara lain dari etnis Tunesia, Yunani, Armenia, dan Arab (Ochsenwald, 2022). Masyarakat Lebanon telah mengalami masa sulit ditengah krisis ekonomi, kesengsaraan yang terjadi dan dialami masyarakat Lebanon tentu dipengaruhi juga oleh kondisi perpolitikan domestik yang kurang stabil. Bahkan dalam hal ini pada tahun 2020 Lebanon tidak memiliki otoritas eksekutif dalam rencana pembentukan pemerintahan ketiganya (World Bank, 2021, p. xi). Sehingga ketidakstabilan politik Lebanon menyebabkan adanya demonstrasi terhadap perpanjangan ketiga Parlemen meskipun pihak berwenang berusaha untuk menenangkan demonstran agar dapat bertindak secara damai (Human Right Watch, 2018, p. 335). Sehingga hal tersebut menunjukkan kurangnya kesejahteraan publik bagi masyarakat Lebanon karena banyaknya masalah domestik yang dihadapi.

Dalam hal ini ketidakstabilan yang terjadi di masyarakat berpengaruh terhadap pandangan publik itu sendiri atas kondisi yang buruk di negaranya. Bahkan dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik Lebanon mempengaruhi kurangnya kualitas serta kuantitas dari sumber daya di Negara Lebanon (World Bank, 2021, p. 1). Kondisi masyarakat Lebanon juga terbagi dalam karakteristik berbeda dan berkaitan dengan keadaan setiap perwakilan rumah tangga yang dapat memberikan penghasilan, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi buruk yang sangat tinggi bagi Lebanon (Bastagli, Holmes, & Jawad, 2019, p. 19). Dalam hal ini rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih berisiko terpapar kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang memiliki perwakilan laki-laki, dan kondisi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di Lebanon terdata mencapai hingga 11,6% dan yang dikepalai oleh laki-laki mencapai 88,4% (Seshan & Cnobloch, 2022). Selain itu masyarakat Lebanon di hadapkan dengan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang berkaitan dengan status pribadi berdasarkan agama yang berbeda terlebih ketika mengalami perceraian (Human Right Watch, 2018, p. 338).

Selain itu, kondisi publik Lebanon dihadapkan dengan ketidakmampuan badan otoritas untuk pengawasan terhadap pemerintah karena adanya peran elit politik, sehingga sering dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka dengan baik (Merhej, 2021). Buruknya kondisi Lebanon menyebabkan banyak masyarakat Lebanon memilih untuk mencari pekerjaan di luar negaranya

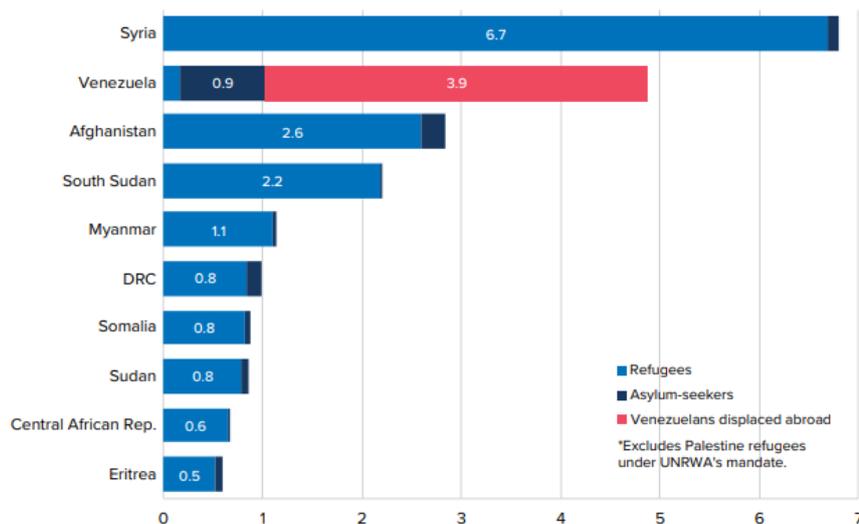
untuk menghidupi keluarganya di Lebanon. Akibatnya, tenaga kerja yang sangat terampil semakin cenderung mengambil peluang potensial di luar negeri, yang berdampak terhadap kerugian sosial dan ekonomi jangka panjang bagi negara (World Bank, 2021, p. 1).

Namun, masyarakat Lebanon memiliki pandangan tersendiri terhadap keberadaan pengungsi di masa krisisnya, terlebih Lebanon menerima keberadaan pengungsi asing dalam jumlah yang cukup banyak. Tentu dalam hal ini sangat berpotensi terhadap keterpurukan yang semakin berat, sehingga dalam hal ini masyarakat Lebanon memiliki hubungan yang kurang baik khususnya terhadap pengungsi yang berasal dari suriah sejak tahun 2017 (Office for The Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], 2021).

2.1.1. Pengungsi Suriah di Lebanon

Selain di tempati oleh pengungsi yang berasal dari Palestina, wilayah Lebanon juga dihuni serta ditempati oleh pengungsi Suriah. Karena dalam hal Negara Suriah termasuk menjadi negara dengan pengungsi terbanyak di dunia. Bahkan pada tahun 2017 Suriah terdata menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbanyak yaitu sekitar 6,3 Juta orang (UNHCR, 2018, p. 3). Namun tahun ke tahun Suriah masih menempati posisi yang sama bahkan terdapat lonjakan tinggi hingga di tahun 2020 sesuai data lapangan mengenai negara-negara berkonflik yang menghasilkan jumlah pengungsi terbesar menurut data UNHCR pada tahun 2020 antara lain Suriah (6,7 juta), Venezuela (4 juta), Afghanistan (2,6 juta), Sudan Selatan (2,2), dan Myanmar (1 juta) (UNHCR, 2021, p. 3). Namun diantara negara-negara pengungsi tersebut, Suriah menjadi negara yang menduduki tingkat pengungsi terbesar di dunia dengan jumlah tertinggi mencapai 6.7 juta di tahun 2020.

Figure 3 | International displacement situations by country of origin | end-2020*

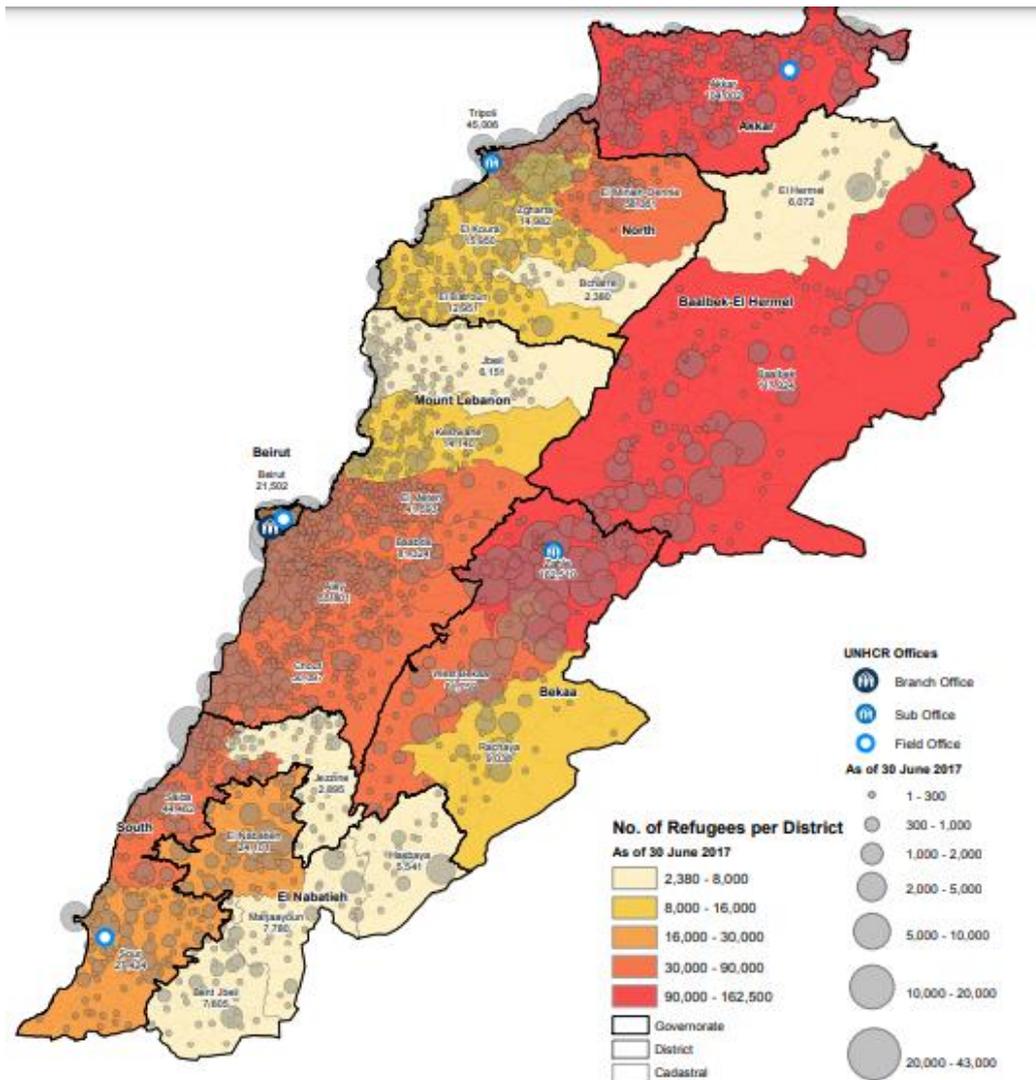


Gambar 1 International Displacement Situations by Country of Origin in 2020 (UNHCR, 2020)

Latar belakang dari lonjakan terhadap jumlah pengungsi yang berasal dari Suriah terjadi karena krisis kemanusiaan di negara tersebut yang disebabkan oleh ketidakberhasilan negara Suriah terhadap fenomena *Arab Spring* yang menyebabkan konflik panjang. *Arab Spring* merupakan fenomena yang menggambarkan adanya gelombang pemberontakan secara besar-besaran terhadap rezim otoriter yang menjabat di kawasan negara Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai bentuk pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2011 (Gaur et. al, 2023).

Ketidakberhasilan Suriah tersebut berdampak terhadap munculnya perang saudara sebagai konflik bersenjata yang mengancam keamanan manusia di dalam negaranya. Dimana sejak tahun 2011 tersebut menimbulkan ketidakamanan dan menyebabkan setidaknya 250.000 warga Suriah tewas, dan 4 juta warga negara yang melakukan pelarian ke negara lain (UNHCR, 2016). Sehingga warga negara Suriah melarikan dan sebagian besar pengungsi yang berasal dari Suriah tersebar di Turki, Lebanon dan Yordania (Martinez, 2015). Mengingat Lebanon yang secara geografis berdekatan dengan Suriah, menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pelarian bagi 5.000 warga sebagai pengungsi sejak 2011 di wilayah utara (UNHCR, 2013).

Dengan ketegangan konflik Suriah yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon meningkat hingga 1,14 juta (Edwards, 2014). Penerimaan tersebut terus mengalami keberlanjutan pada tahun 2017, dimana pengungsi Suriah terdata menempati wilayah negara Lebanon hingga mencapai 992.100 pengungsi Suriah (UNHCR, 2020, p. 14). Bahkan pada pertengahan tahun 2017 Lebanon masih menerima penambahan jumlah pengungsi setidaknya 10.800 pengungsi (UNHCR, 2017, p. 12). Namun pada tahun 2018 keberadaan pengungsi dari Suriah mencapai 944.200 pengungsi (UNHCR, 2019, p. 18). Hingga pada tahun 2019 keberadaan pengungsi Suriah di wilayah Lebanon berlanjut dengan data lapangan yang menyatakan setidaknya 910.600 orang Suriah (UNHCR, 2020, p. 20). Bahkan pada tahun 2020 Lebanon mendapatkan setidaknya 24% pengungsi Suriah yang ditempati di wilayah negara Lebanon (UNHCR, 2021, p. 46).



Gambar 2 Letak Wilayah Lebanon yang di tempati Pengungsi Suriah (UNHCR, 2017)

Meskipun Lebanon menerima keberadaan pengungsi Suriah namun dalam hal ini karena tingginya jumlah pengungsi Suriah membuat pemerintah tidak memberikan kamp formal secara resmi bagi mereka (Vulnerability Assessment of Syrian Refugee in Lebanon [VASyR], 2020, p. 42). Sehingga mereka harus menempati wilayah-wilayah Lebanon di pedesaan, perkotaan dan membangun perkemahan tempat tinggal mereka sendiri. Bahkan pada tahun 2017 sebagian besar pengungsi yang berasal dari Suriah yaitu 73% dari keseluruhan tidak mendapatkan tempat tinggal secara resmi (VASyR, 2018, p. 3).

Pengungsi Suriah itu sendiri dengan kedatangannya dalam jumlah yang cukup tinggi bagi Lebanon berpengaruh terhadap izin penempatan kamp secara resmi. pada tahun 2018 mencapai 4.446 rumah tangga pengungsi yang berasal dari Suriah terdata menempati 26 distrik di wilayah Lebanon (VASyR, 2018, p. 1). Dimana pengungsi Suriah menempati penampungan yang sesak yang terdata 34% pada tahun 2018 dan 32% pada tahun 2019 di wilayah 4,5 m² per orang baik dalam penampungan

non-permanen dan non-perumahan (VASyR, 2020, p. 45). Selain itu, sebagian besar pengungsi Suriah di Lebanon menempati wilayah perkotaan (Government of Lebanon and the United Nations, 2021, p. 42).

Meskipun dalam hal ini pengungsi Suriah tersebut mengalami keterpurukan yang tidak jauh beda dengan negara asalnya karena keterpurukan dari kondisi domestik Lebanon yang sedang terjadi. Dimana dalam hal ini secara kondisi ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial merupakan hal yang sulit untuk dihadapi bagi para pengungsi di Lebanon (Yahya, Kasir, & el-Hariri, 2018, p. 13). Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya akses layanan serta keterpurukan yang tinggi dalam masalah sosial (Government of Lebanon and the United Nations, 2021, p. 42). Selain itu, pengungsi Suriah mengalami kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di negara dengan krisis ekonomi yang berlangsung. Bahkan 43% pengungsi Suriah yang berada dalam penampungan hidup yang padat dengan situasi memprihatinkan dan hal tersebut menyebabkan pengungsi Suriah dinyatakan hidup dalam bawah standar kemanusiaan.

2.2. *Keputusan Berdasarkan Public Opinion*

Keputusan suatu negara dalam membentuk kebijakan dapat dipengaruhi oleh opini publik terhadap suatu kondisi tertentu (Government of Lebanon and the United Nations, 2021, p. 131-132). Dimana dalam hal ini publik berkaitan erat dengan masyarakat yang memberikan pendapatnya serta responnya terhadap suatu hal. Kondisi domestik Lebanon itu sendiri menunjukkan keterpurukan baik dalam kehidupan politik, sosial, terlebih krisis ekonomi yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Sehingga dengan keberadaan pengungsi asing yang masih harus diterima di tengah keterpurukannya tersebut berpengaruh terhadap pandangan serta respon masyarakat Lebanon. Pentingnya opini publik terhadap keberadaan pengungsi bagi Lebanon dapat dilihat dari kekhawatiran Pemerintah terhadap ketegangan hubungan antara pengungsi dan rakyatnya, seperti Perdana Menteri Lebanon yang menyatakan;

"Today, if you go around most of the host communities, there is huge tension between the Lebanese and the Syrians ... I fear civil unrest."
(Ibrahim, 2017)

Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan buruk antara masyarakat dengan pengungsi asing khususnya yang berasal dari Suriah, karena dianggap sebagai sebuah beban yang dapat memperburuk keadaan krisis negaranya (Government of Lebanon and the United Nations, 2019, p. 14). Selain itu, terdapat ketegangan sosial di wilayah Akkar, Baalbek-El, Hermel, Bekaa, dan North yang disebabkan oleh adanya persaingan dalam hal pekerjaan antar komunitas pengungsi. Hal tersebut menunjukkan telah adanya gesekan sosial antar masyarakat dan pengungsi yang semakin memperlihatkan konsekuensi besar bagi Lebanon. Sehingga, situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Lebanon untuk mendorong adanya bantuan dari berbagai pihak internasional. Dimana hal tersebut terbukti dengan adanya dorongan

Pemerintah Lebanon yang meminta bantuan dari Komunitas Internasional sekitar \$10.000 hingga \$12.000 untuk program pemulihan ekonomi Lebanon, terlebih sebagai negara dengan banyak pemukiman pengungsi asing (Ibrahim, 2017). Melihat fakta yang disebutkan di atas, pembentukan opini publik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan Lebanon. Meskipun, dalam hal ini pandangan masyarakat tersebut digunakan sebagai salah satu acuan Pemerintah untuk memperlihatkan keterpurukan dan konsekuensi Lebanon dengan keberadaan pengungsi asing. Namun, hal tersebut berhasil menjadi sebuah perhatian besar bagi Komunitas Internasional untuk memberikan simpati yang besar kepada negara Lebanon.

2.3. *Vice Versa Pengungsi Asing di Lebanon*

Meskipun terdapat bantuan dana dari berbagai pihak melalui Komunitas Internasional, baik secara langsung diberikan kepada Lebanon maupun bagi para pengungsi untuk membantu kelanjutan hidup di Lebanon. Namun, dalam hal ini justru terdapat suatu beban dan tantangan bagi pengungsi asing untuk bertahan hidup di Lebanon sebagai negara yang tengah mengalami krisis. Karena, dalam hal ini terdapat pemberlakuan yang menjadi dilema bagi pengungsi, khususnya bagi yang belum mendapatkan kamp resmi sebagai tempat tinggalnya, namun dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Lebanon untuk perekonomiannya, antara lain sebagai berikut:

2.3.1. *Pembayaran Tahunan untuk Pembaharuan Identitas*

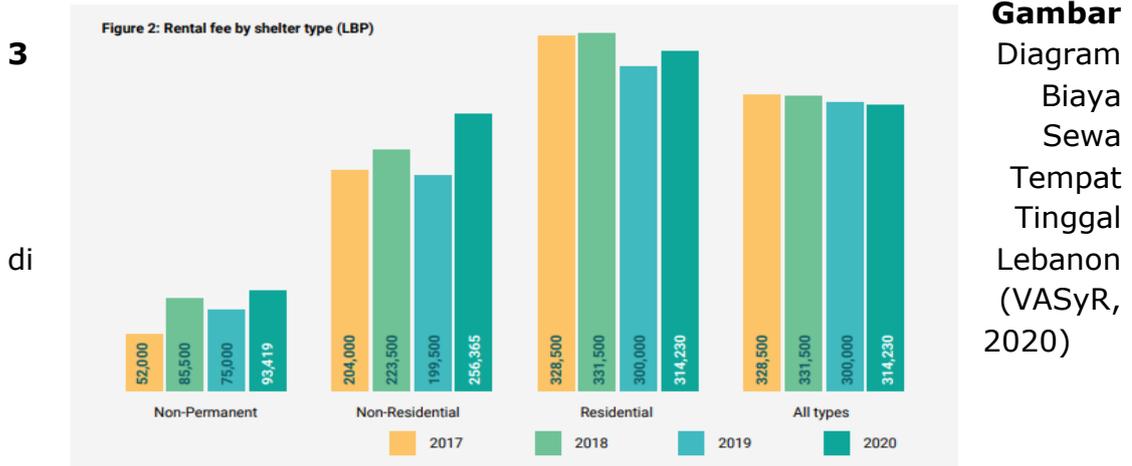
Terdapat pemberlakuan iuran untuk keberadaan para pengungsi asing, sehingga dalam hal ini pengungsi asing yang berada di wilayah Lebanon diharuskan mendaftarkan pembaharuan data setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan yang telah diberikan berdasarkan GSO (*General Security Office*) mengenai hal-hal tersebut, terlebih dalam hal ini terdapat publikasi terbaru sejak tahun 2017 bahwa bagi pengungsi khususnya pengungsi dari Suriah yang belum mendaftar sebelum awal tahun 2015 akan mendapatkan pembebasan biaya untuk izin tinggal secara gratis (UNHCR, 2017, p. 2).

Sedangkan bagi pengungsi yang belum melakukan pendaftaran secara resmi kepada UNHCR diharuskan mendapatkan sponsor dari pihak Lebanon dan hal tersebut juga dikenakan biaya untuk pembaharuan administrasi identitas, tempat tinggal setiap tahunnya. Dimana biaya tahunan dikenakan sekitar \$200 dan dibayarkan ke negara Lebanon melalui pihak berwenang (UNHCR, 2017, p. 2). Namun, bagi pengungsi yang tidak mampu mengakses layanan dan dengan rendahnya status hukum berisiko terhadap eksploitasi dalam hal tenaga kerja atau bahkan pelecehan seksual terhadap para pengungsi paling rentan (Karasapan & Shah, 2021). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengungsi asing mendapatkan pendanaan secara tunai, mereka diharuskan membayar iuran pembaharuan setiap tahunnya kepada Lebanon bagi pengungsi yang belum mendapatkan kamp secara resmi.

2.3.2. *Sewa Tempat Tinggal*

Karena terdapat pengungsi-pengungsi asing yang belum atau tidak mendapatkan kamp secara resmi dari Lebanon seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya. Sehingga diperlukan adanya sponsor, sebagai pemberlakuan untuk pendaftaran tempat tinggal bagi pengungsi asing dari Suriah yang tidak terdaftar di UNHCR, sehingga sponsor sebagai pihak dari entitas nasional yang menjadi sebuah prosedur tanggung jawab keberadaan pengungsi asing (Human Right Watch, 2017). Terlebih khususnya terhadap pengungsi Suriah dan Palestina dari Suriah, Pemerintah tidak bersedia menyediakan kamp secara formal untuk menghindari adanya keberadaan secara permanen (Ibrahim, 2017).

Sehingga hal tersebut mendorong adanya pemberlakuan dimana para pengungsi tersebut diharuskan menempati kawasan padat dengan menyewa tempat. Seperti halnya pengungsi Suriah yang menempati wilayah Lebanon dengan harus membayar sewa tempat tinggal dari tahun ke tahun. Dalam hal pemberlakuan penyewaan rumah terdapat perjanjian dengan entitas lokal dalam transaksi baik mengenai biaya maupun masa berlakunya. Dalam hal ini penyewaan dapat dilakukan terhadap tuan rumah atau masyarakat domestik Lebanon, dan dalam prosedurnya sebagian besar melakukan perjanjian tanpa notaris (OCHA, 2018, p. 33). Karena hal tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah terhadap pengungsi yang belum mendaftar dan memiliki tempat secara resmi untuk mendapatkan sponsor dari entitas nasional (Human Right Watch, 2017). Sehingga terdapat pemberlakuan sewa terhadap non perumahan, toko, pertanian yang mana tentu hal tersebut dimiliki oleh sebagian warga Lebanon sebagai properti pribadi. Dengan penyewaan terhadap pengungsi Lebanon hal tersebut dapat setidaknya berpengaruh terhadap pendapatan warga lokal yang bersedia. Sehingga masyarakat yang bersedia menjadi sponsor bagi para pengungsi mendapatkan keuntungan tersendiri. Bahkan hal tersebut menjadi sebuah hal yang dimanfaatkan bagi oknum masyarakat Lebanon yang menjadi sponsor hunian untuk pengungsi yang belum mendapatkan tempat tinggal untuk memberikan biaya hingga mencapai \$1.000 (Human Right Watch, 2017). Namun harga tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga pasaran secara umum untuk penyewaan tempat tinggal, seperti gambar diagram dibawah ini mengenai harga biaya sewa dengan mata uang Pound Lebanon, antara lain:



Menurut data tersebut, menyatakan bahwa penyewaan terhadap tempat tinggal bagi pengungsi yang secara resmi tidak mendapatkan kamp mengalami peningkatan hingga 25% jika dibandingkan dari tahun 2019 (VASyR, 2021, p. 43). Bahkan karena adanya pemberlakuan penyewaan terhadap pengungsi yang belum dan tidak mendapatkan kamp secara resmi tersebut justru menyebabkan 43% hingga 49% keluarga para pengungsi harus melakukan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan sewa mereka. Karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap keluarga untuk membayar rumah sewaan menyebabkan peningkatan berbagi unit rumah antar pengungsi (Atrache, 2021, p. 6). Sehingga hal tersebut yang menyebabkan kehidupan para pengungsi yang berada dalam kepadatan dan kesusahan. Dalam hal ini entitas lokal yang bersedia menjadi sponsor sehingga dapat untuk menambahkan pemasukan perekonomian. Terlebih dengan \pm sepertiga dari yang terdaftar di kotamadya pengungsi membayar pajak terhadap tempat tinggal di wilayah tersebut (VASyR, 2020, p. 48). Sehingga pemberlakuan sponsor serta biaya sewa menjadi beban karena pengungsi harus mengeluarkan uang bantuan mereka yang didapatkan untuk pembayaran tersebut.

2.3.3. Biaya Denda

Lebanon sebagai tuan rumah bagi banyak pengungsi telah menerapkan batasan-batasan mengenai pekerjaan bagi para pengungsi asing. Dimana secara khusus Lebanon tidak memperbolehkan adanya pembangunan usaha pribadi dari pengungsi asing. Terkecuali bagi mereka yang telah mendaftarkannya secara legal sehingga Lebanon dapat memperoleh pajak dari usaha tersebut. Namun, bagi usaha ilegal yang belum memiliki izin seringkali menyebabkan Pemerintah Lebanon bertindak tegas untuk menarik bayar denda terhadap pemiliknya. Dimana dalam hal ini pengungsi harus membayar denda sekitar \$1.600 dan resiko penutupan usaha hingga pemiliknya menyelesaikan persyaratan usahanya tersebut (Houssari, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam

keadaan sulit, setidaknya Lebanon menerima pembayaran pajak yang terdaftar dari kota Madya (VASyR, 2021, p. 44).

Sehingga, melalui pembahasan mengenai faktor pendorong kepentingan Lebanon tersebut yang sesuai dengan konsep kebijakan luar negeri menurut Alex Mintz dan Karl Derouen dengan "*Domestic Factors*," menunjukkan kepentingan berdasarkan opini publik serta ekonomi menjadi alasan dibalik penerimaan keberadaan pengungsi asing pada masa krisis ekonomi tahun 2017-2020. Kedua indikator kepentingan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain untuk memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup bangsanya. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana realis menunjukkan kelangsungan hidup negara sebagai tujuan utama melalui pencapaian keuntungan dan kepentingan negaranya sebagai etika tanggung jawab (Jackson & Sorensen, 2013, p. 69).

Dalam kepentingan yang berdasarkan opini publik menunjukkan Lebanon yang menggunakan ketidakharmonisan antara masyarakat dengan komunitas beberapa pengungsi sebagai acuan untuk menarik perhatian Internasional mengenai keberadaan pengungsi yang sangat berisiko terhadap kondisi negaranya. Sehingga, hal tersebut menjadi sebuah strategi yang berkaitan dengan kepentingan untuk keuntungan ekonomi Lebanon itu sendiri. Karena, dengan Lebanon yang seringkali berusaha menunjukkan resiko dan keterpurukan kondisinya, pada akhirnya mendapatkan tanggapan atau simpati yang besar dari Komunitas Internasional. Sehingga, menunjukkan bahwa melalui kebijakan luar negerinya, Lebanon dapat menyasati tujuan untuk kepentingannya. Sesuai dengan pandangan realisme terhadap penggambaran negara yang dapat bertindak melalui kebijakan luar negerinya untuk memanipulasi atau penipuan (Antines & Camisã, 2017, p. 16). Menunjukkan bahwa kebijakan Lebanon merupakan tindakan negara dalam membentuk sebuah strategi negara untuk mendapatkan keuntungan atau pencapaian kepentingan negaranya.

Sehingga, dari kepentingan berdasarkan ekonomi itu sendiri secara jelas dapat dilihat dengan adanya pendanaan yang didapatkan Lebanon melalui berbagai pihak ataupun Komunitas Internasional serta *Vice Versa* terhadap pengungsi dalam hal penyewaan, pembayaran, dan biaya hidup yang secara ekonomi dapat menguntungkan ekonomi Lebanon. Hal tersebut menunjukkan kepentingan yang dipengaruhi kondisi domestik Lebanon yang mengalami keterpurukan khususnya dalam krisis ekonomi. Sehingga, tentu dalam hal ini Lebanon lebih mengedepankan kepentingan untuk kelangsungan hidup bangsanya. Karena tindakan suatu negara yang lebih mengedepankan kelangsungan hidup negara dipandang sebagai tindakan yang rasional sepenuhnya (Antines & Camisã, 2017, p. 20).

Tindakan Lebanon yang mengedepankan keuntungan negaranya dan cenderung memberatkan kehidupan pengungsi menunjukkan perilaku gesit dalam mencapai keuntungan. Selaras dengan realis yang menekankan, melalui pembuat kebijakan dianggap sebagai aktor yang dapat bertindak secara rasional melalui tindakan yang gesit dan licik guna mendapatkan kesempatan

dalam mencapai keuntungan untuk kepentingan nasionalnya (Jackson & Sorensen, 2013, p. 69). Karena dalam kebijakan luar negeri itu sendiri berkaitan dengan dilema moralitas, sehingga ketika dalam tujuan untuk pencapaian kepentingan maka terkadang suatu negara membenarkan tindakan yang memiliki pertentangan secara moral (Jackson & Sorensen, 2013, p. 74)., terlebih bagi negara yang secara domestik mengalami keterpurukan seperti Lebanon. Selain itu, publik sendiri pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan melalui pemberlakuan sponsor serta sewa tempat tinggal, karena entitas lokal yang memiliki properti dapat menyewakan sehingga, tentu menjadi potensi yang memberikan keuntungan bagi warga lokal. Dalam hal ini menunjukkan pandangan realis yang menekankan sifat dasar manusia yang cenderung berusaha untuk mencapai keuntungan atas orang lain (Jackson & Sorensen, 2013, p. 66).

Seringkali kebijakan suatu negara dalam menerima keberadaan pengungsi didasari oleh tindakan kemanusiaan, namun hal tersebut seakan mengesampingkan kepentingan yang bukan hanya sekedar tindakan manusia dalam hal moralitas. Karena tingginya resiko bagi Lebanon menerima keberadaan pengungsi asing di masa krisis, sehingga tidak mungkin Lebanon mempertaruhkan kondisi negaranya kedalam hal yang dapat menghancurkan bangsanya sendiri. Bahkan pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa Lebanon sebagai suatu negara membentuk strategi untuk mencapai kepentingan melalui kebijakannya yang tidak hanya didasari oleh tindakan kemanusiaan, melainkan untuk membantu pemulihan dan kelangsungan hidup bagi bangsanya. Dimana dalam hal ini kepentingan yang berdasarkan opini publik serta ekonomi memiliki keterkaitan untuk memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup bangsa Lebanon itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana realis menekankan bahwa jika suatu negara bertindak hanya atas dasar moralitas dapat berdampak terhadap kehancuran negaranya (Antines & Camisã, 2017, p. 16).

3. Kesimpulan

Pengungsi telah menjadi masalah internasional yang sangat sering terjadi dalam kurun waktu 1 abad terakhir dimulai dari perang dunia 1 hingga perang sipil di berbagai negara. Keberadaan mereka selalu menjadi dilema yang cukup tinggi mengingat begitu banyak hal yang harus diantisipasi terkait permasalahan pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Kondisi mereka yang terkendala berbagai aspek seperti bahasa, izin kerja, kesempatan kerja, dan juga perbedaan budaya menjadikan mereka harus bergantung kepada kemurahan hati warga negara penerima untuk dapat berbagi hidup dengan mereka. Izin dari warga negara diperlukan bagi pemerintah untuk menerima pengungsi, maka dari itu opini publik sebagai salah satu faktor domestik dirasa sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan.

Kepentingan dari pengaruh opini publik yang mendorong pemerintah menunjukkan keterpurukan yang semakin buruk karena adanya resiko dalam kehidupan sosial antara beberapa pengungsi dan warga lokal untuk mendapatkan perhatian serta simpati komunitas internasional. Namun disisi lain publik itu sendiri mendapatkan keuntungan melalui pemberlakuan entitas nasional yang dapat menjadi sponsor bagi para pengungsi asing yang tidak memiliki kamp resmi sehingga bagi masyarakat yang menjadi sponsor mereka justru memberikan harga sewa yang cukup besar bagi para pengungsi. Karena tidak dapat dipungkiri melalui uang sponsor yang mereka berikan kepada pengungsi dapat membantu kondisi krisis ekonomi untuk kehidupan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan untuk kelangsungan hidup menjadi alasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pengungsi asing.

Dalam kasus pengungsi di Lebanon, keberadaan mereka dapat menjadi keuntungan dikarenakan Pemerintah Lebanon yang mampu untuk mencari celah yang cukup baik. Mengambil keuntungan dari keberadaan pengungsi tidak menjadi suatu hal yang tabu untuk saat ini dikarenakan keberadaannya yang sering kali justru merugikan bagi negara yang sedang berkembang atau sedang mengalami krisis. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara yang sudah maju dan menjadi destinasi daripada para pengungsi selama ini. Perubahan persepsi para pengungsi yang selama ini seringkali ingin menuju negara makmur dan berubah menjadi ingin menuju negara aman walaupun dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu makmur menjadikan negara-negara tujuan baru ini harus memulai untuk mengambil sikap agar tidak merugikan berbagai pihak terutama warga negaranya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Lebanon.

Daftar Pustaka

Buku

- Antunes, S., & Camisã, I. (2017). *International Relations Theory*. Bristol: E-International Relations.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Bristol: E-International Relations.
- United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS). (2009). *Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. New York: United Nations Trust Fund for Human Security.
- Yahya, M., Kasir, J., & el-Hariri, K. (2018). *Unheard Voices: What Syrian Refugees Need to Return Home*. Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace.

Artikel Jurnal

- Human Rights Watch. (2007). Rot Here Or Die There: Bleak Choices for Iraqi Refugees in Lebanon. *Human Rights Watch*, 19(8E), 1-66.

Website

- Atrache, S. (2021). *Lebanon's Deepening Crisis: The Case for a Sustainable Aid Respons.* Retrieved from: <https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/11/29/lebanons-deepening-crisis-the-case-for-a-sustainable-aid-response>
- Bastagli, F., Holmes, R., & Jawad, R. (2019). *Social protection in Lebanon: a review of social assistance.* London: Overseas Development Institute. Retrieved from: https://www.unicef.org/lebanon/media/5671/file/Lebanon_social_protection_report_ODI.pdf.pdf.
- Edwards, A. (2014). *Needs Soar as Number of Syrian Refugees Tops 3 Million.* UNHCR. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/news/latest/2014/8/53ff76c99/needs-soar-number-syrian-refugees-tops-3>
- Gaur, A., et. al. (2023). *Arab Spring: Pro-Democracy Protests.* Retrieved from: <https://www.britannica.com/event/arab-spring>
- Gómez, A. & Gasper, D. (2013). *Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams.* Retrieved from: https://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf
- Government of Lebanon and the United Nations. (2021). *Lebanon Crisis Response Plan 2017-2021.* Retrieved from: <https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2021-2021-update1>
- Houssari, N. (2019). *Crackdown on thousands of Syrian refugees with illegal jobs in Lebanon Previous.* Retrieved from: <https://www.arabnews.com/node/1523926/middle-east>
- Human Right Watch. (2017). *Lebanon: New Refugee Policy: a Step Forward.* Retrieved from: <https://www.hrw.org/news/2017/02/14/lebanon-new-refugee-policy-step-forward>
- Human Right Watch. (2018). *World Report 2018.* Retrieved from: <https://www.hrw.org/world-report/2018>
- Ibrahim, H. (2017). *PM Hariri: Lebanon at 'breaking point' due to refugees.* Retrieved from: <https://www.aljazeera.com/news/2017/4/1/pm-hariri-lebanon-at-breaking-point-due-to-refugees>
- Johnson, S., et. al. (2011). *Country Profile of Lebanon.* Retrieved from: <https://www.unhcr.org/528a0a2da.pdf>
- Karasapan, O., & Shah, S. (2021). *Why Syrian refugees in Lebanon are a crisis within a crisis.* Retrieved from: <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/04/15/why-syrian-refugees-in-lebanon-are-a-crisis-within-a-crisis/>.
- Kayali, Y. (2022). *Syrian Refugees in Lebanon Need Help and Protection, Not More Pressure to Leave.* Human Rights Watch. Retrieved from:

<https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2022/1/18/syrian-refugees-lebanon-help-protection-pressure-leave>

- Kedutaan Besar Republik Indonesia. (2018). *Profil Negara dan Kerja Sama Beirut*. Retrieved from: <https://kemlu.go.id/beirut/id/read/profil-negara-dan-kerjasama/3490/etc-menu>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. (n.d.). *Profil Suriah*. Retrieved from: https://kemlu.go.id/damascus/id/pages/sekilas_suriah_/108/etc-menu
- Martinez, M. (2015). *Syrian refugees: Which countries welcome them, which ones don't*. Retrieved from: <https://edition.cnn.com/2015/09/09/world/welcome-syrian-refugees-countries/index.html>
- Merhej, K. (2021). *Breaking the Curse of Corruption in Lebanon*. Research Paper Chatham House. Retrieved from: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-29-breaking-curse-corruption-lebanon-merhej.pdf>
- Ochsenwald, W. (2022). *Lebanon*. Retrieved from: <https://www.britannica.com/place/Lebanon>
- Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2018). *Lebanon from Homs City Implications of the Protracted Refugee Crisis*. Retrieved from: <https://reliefweb.int/report/lebanon/housing-land-and-property-issues-syrian-refugees-lebanon-homs-city-implications>.
- Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2021). *Lebanon Crisis 2017-2021 Response Plan*. Retrieved from: <https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2021-2021-update>.
- Seshan, G. & Cnobloch, S. (2022). *Lebanon: Multi-Dimension Poverty Index Shows 53% of Residents Were Poor Before Crisis*. Retrieved from: <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/lebanon-multi-dimension-poverty-index-shows-53-residents-were-poor-crisis>.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2013). *Global Appeal 2013*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/50a9f82824.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2014-2015). *UNHCR Global Appeal 2014-2015*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/528a0a2da.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2016). *Ahead of Geneva Talks, UN Envoy Addresses All Syrians in Video Message*. Retrieved from: <https://news.un.org/en/story/2016/01/521122-ahead-geneva-talks-un-envoy-addresses-all-syrians-video-message#.VrnygPmLSHt>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2016). *Human Security Handbook: an Integrated Approach for The Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*. Retrieved from: <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2017). *Mid-Year Trends 2017*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/5aaa4fd27.pdf>

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2017). *Protection in Focus Issue No. 1*. Retrieved from: https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2018/07/Protection-In-Focus-Issue-1_2017.pdf.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). *Global Trends Forced Displacement in 2017*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/globaltrends2018/>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2020). *Global Trends Forced Displacement in 2017*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/globaltrends2017/#:~:text=globally%2c%20the%20forcibly%20displaced%20population,again%20at%20a%20record%20high>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2020). *Lebanon Operational Fact Sheet*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/UNHCR-Lebanon-Operational-Fact-Sheet-January-2020.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2021). *Global Trends Forced Displacement in 2020*. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (n.d.). *State Parties to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and The 1967 Protocol*. Retrieved from: <https://Www.Unhcr.Org/Protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (n.d.). *Syrian Regional Refugees Response*. Retrieved from: <https://data.unhcr.org/en/situations/syria/location/71>
- Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR). (2020). *Shelter dalam Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon*. Retrieved from: <https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2018-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon>.
- Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon (VASyR). (2018). *2018 Executive Brief*. Retrieved from: <https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2020-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon>.
- Watson Institute. (2021). *Iraqi Refugees*. Retrieved from: <https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/refugees/iraqi>
- World Bank. (2021). *The Policy Context dalam Lebanon Economic Monitor Lebanon Sinking (To The Top 3)*. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-spring-2021-lebanon-sinking-to-the-top-3>
- World Population Review. (n.d.). *Where is Palestine in the World?*. Retrieved from: <https://worldpopulationreview.com/countries/palestine/location>